

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERDAMPAK *COVID-19* DI KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA

REYVALDO INRICO LALOAN
JOHNNY HANNY POSUMAH
NOVIE PALAR

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak *COVID-19* di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada masyarakat, bahwa dalam proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak *COVID-19* belumlah berjalan dengan semestinya yang diharapkan oleh banyak masyarakat. Sebab masih ada penyelewengan yang terjadi pada saat pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak covid di kecamatan kawangkoan. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan populasi di Kecamatan Kawangkoan sebesar 10.226 dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang di dalam populasi. Pada penelitian ini, peneliti memakai Teknik Analisis data dengan menggunakan teknik analisis data Regresi Linear Sederhana.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Sosial

Abstract

The purpose of this research is to find out how big the implementation of the policy of providing social assistance for the welfare of the poor affected by COVID-19 in Kawangkoan District, Minahasa Regency. This research is a descriptive study with a quantitative approach. Based on preliminary observations made by researchers in the community, that in the process of providing social assistance to poor people affected by COVID-19, it has not gone well as expected by many people. Because there is still fraud that occurs when providing social assistance to poor people affected by Covid in the Kawangkoan sub-district. In this study, the researcher used a population in the Kawangkoan District of 10,226 by taking a sample of 30 people in the population. In this study, researchers used data analysis techniques using simple linear regression data analysis techniques.

Keywords: Implementation, Policy, Policy Implementation, Social Welfare

PENDAHULUAN

Bantuan Sosial (Biasa di singkat Bansos) Banyak mendapat perhatian public karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (Selanjutnya disebut pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas.

Penyaluran Bansos merupakan otoritas administrative masing-masing Pemda. Namun akibat dari ketidak seragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja

Bansos disetiap daerah yang diperlihatkan Pemda, diduga ini dipengaruhi oleh masing-masing Pemda. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja Bansos, tetapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan penerapan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara umum.

Daerah diperbolehkan memberikan bansos sesuai kemampuan daerah setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib.

Yang berhak menerima bansos adalah masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil dari krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup minimum. Bansos dapat juga diberikan kepada Lembaga Non Pemerintahan (*Non Government Organisation*) yang bergerak dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kriteria penerima Bansos adalah mereka yang berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah kabupaten (Pemkab) yang bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari Bansos adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitas sosial, dan penanggulangan bencana. Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan secara eksplisit pengertian pelaksanaan kebijakan sebagai Studi tentang implementasi kebijakan sangat penting untuk studi administrasi public dan kebijakan public. Implementasi kebijakan, seperti yang telah terlihat adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan – seperti bagian dari tindakan legislatif, mengeluarkan perintah eksekutif, menjatuhkan peradilan keputusan, atau pemberlakuan aturan regulasi dan konsekuensi dari kebijakan yang membuat banyak orang terkena dampaknya. Menurut juga Van meter dan Van horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya.

- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Hubungan antar organisasi
- 5) Sikap para pelaksana
- 6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Teori Kesejahteraan Sosial

Adi (2013) menyebutkan beberapa paradigma kesejahteraan sosial, salah satunya adalah paradigma developmental atau model kesejahteraan developmental. Paradigma ini merupakan konsepsi tentang sistem kesejahteraan sosial yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (*social justice*) yang menekankan pada aspek kesetaraan, kerja sama, dan kemauan untuk saling berbagi dari anggota masyarakat. Selain itu, Adi menyebutkan bahwa bidang kesejahteraan sosial dapat dikelompokkan berdasarkan besaran (*size*) kelompok yang dituju, yaitu: (1) kesejahteraan individu, (2) kesejahteraan keluarga, (3) kesejahteraan kelompok, (4) pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal, dan (5) pengembangan kesejahteraan publik secara luas.

Implementasi Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Sosial

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus di lakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Indikator:

- Transmisi

- Kejelasan
- Konsistensi

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Indikator

- Staf
- Informasi
- Wewenang
- Fasilitas

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparatur rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga. Seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Indikator:

- Efek disposisi
- Melakukan pengaturan birokrasi
- Insentif

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP), SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Indikator:

- Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Melakukan Fragmentasi

METODE PENELITIAN

Desain penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang terdampak covid-19 di kecamatan Kawangkoan. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan sehingga yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Sosial.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kecamatan Kawangkoan yang berjumlah 10.226 masyarakat dan pada pengambilan sampel peneliti tidak mengambil seluruh sampel populasi tetapi peneliti melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*) dalam menentukan jumlah sampel dan sampel yang digunakan adalah 30 orang.

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data dimulai dengan observasi awal, pengambilan data sekunder di Kantor Kecamatan Kawangkoan, kemudian dilakukannya wawancara kepada masyarakat yang telah diberikan bantuan sosial dengan menggunakan kuesioner penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Sederhana melalui program SPSS untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya yaitu pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistik untuk analisis regresi linear sederhana melalui perhitungan yang menggunakan bantuan program computer SPSS versi 26, dengan hasil nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.10$ dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel Implementasi Kebijakan (X) terhadap variabel Kesejahteraan Sosial (Y) dan Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar $1.966 > t_{tabel}$ 1.701 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan (X) berpengaruh terhadap variabel Kesejahteraan Sosial (Y). Sehingga dapat diketahui bahwa variabel Independent (X) berpengaruh terhadap variabel Dependent (Y).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari variabel yang diteliti dan melalui perhitungan yang menggunakan bantuan program computer SPSS versi 26, maka nilai signifikan adalah sebesar $0.000 < 0.10$, dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel Implementasi Kebijakan (X) terhadap variabel Kesejahteraan Sosial (Y) dan Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar $1.966 > t_{tabel}$ 1.701 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan (X)

berpengaruh terhadap variabel Kesejahteraan Sosial (Y).

Saran

1. Bagi Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Penting adanya koordinasi dan sosialisasi mengenai pemberian bantuan sosial khususnya pemberian bantuan sosial di masa pandemi ini, agar semua masyarakat tahu bahwa adanya bantuan pemberian yang akan diberikan oleh pemerintah, dan juga agar pemerintah lebih transparan kepada masyarakat dan tidak hanya memilih suku, ras atau agama dalam pemberian bantuan sosial sebab semua masyarakat berhak mendapatkan bantuan di masa pandemic ini tanpa melihat suku, ras atau pun agama.
2. Bagi Masyarakat Kecamatan Kawangkoan Pentingnya keterlibatan dari masyarakat untuk mengawal atau melihat jika ada kejanggalan dalam pemberian bantuan sosial dari pemerintah, agar masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika ada kesalahan atau penyelewengan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak *COVID-19* di Kecamatan Kawangkoan.
3. Bagi peneliti selanjutnya Agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan variabel yang lebih luas dan belum diteliti maka akan ditemui hal-hal baru dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Sehingga adanya perkembangan dari penelitian terdahulu ke penelitian dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2013. *Kesejahteraan Sosial pekerjaan sosial, pembangunan sosial dan kajian pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Alba, A. 2019. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. :Unima Press,
- Andrianto, W. 2007. *Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju
- Assa, T. G. M. 1991. *CH. CH. Taulu (Pejuang Merah Putih Di Sulawesi Utara)* Manado
- Creswell, J. W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, G. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton DC: Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the Third worldr*. New Jersey: Pricenton University Press.
- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*: Yogyakarta.
- Margende, H. D. 2016. Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Rakyat Miskin di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*
- Mazmanian, D. A. & Paul S. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harpens Collins
- Meter, V. Donalds. Van Horn. C. E. 1975. *The Policy Implementation Process; "A Conceptual Framework"*. Administration Society. Vol. 6 No. 4
- Mulyadi, D. 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Nakamura, R. T. and Frank. S. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin
- Pioh, E. 2015. Implementasi Kebijakan Pengasuhan Anak dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Panti Asuhan Nazareth Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*,
- Rangkuli, I. 2014. Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sasongko, B. A. dan Suwitri S. 2015. *Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Di Kecamatan Banyumanik Semarang*, *Jurnal Administari Publik*, Universitas Diponegoro.
- Setyawan, D. 2017. *Pengantar Implementasi Publik*. Malang.
- Siregar, K. 2015. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kualitas Pelayanan Swasembada Beras Di Kabupaten Simeulue*, *Jurnal Universitas Terbuka*, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suharto, E. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Susanto, H. 2010. *Panduan Praktis Menyusun Proposal*. Jakarta.

Taalongonan, E. 2016. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*

Totok, M. dan Poerwoko S. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Wahab, S. A. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press IKAPI

Sumber lain:

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017
Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai

Keputusan Menteri Sosial RI No. 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Disease Virus 2019 (*COVID-19*)

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2020 Pasal 23-24 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.